Kumawula, Vol. 3, No.2, Agustus 2020, Hal 367 – 373

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i2.24861>

ISSN 2620-844X (online)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

POTENSI UMKM DI PANGANDARAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

An An Chandrawulan¹, Dandrivanto Budhijanto², Isis Ikhwansyah^{2,3}, Dewi Kania Sugiharti, Prita Amalia, Purnama Trisnamansyah, Pupung Faisal, Helitha Novianty Muchtar^{2,*}

Universitas Padjadjaran

Korespondensi : helitha.novianty@unpad.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are expected to become one of the economic sectors in driving the national economy with their contribution and role in absorbing more labor compared to other business entities. In addition, SMEs, especially those in Pangandaran Regency, have a variety of uniqueness both from the types of business activities, products, and other things that have the potential to face the ASEAN Economic Community (MEA). However, common problems faced by MSMEs such as limited capital, human resources who are less competent in their fields and the use of technology need support from various parties in the form of strengthening. The methodology in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques by collecting data through interviews and observations. In addition, other data sources come from laws and regulations, scientific journals and so on. The purpose of this study is to increase the potential of MSMEs in facing the ASEAN Economic Community (MEA).

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi salah satu sektor ekonomi dalam penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan perannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainnya. Selain itu, UMKM yang terkhususnya berada di Kabupaten Pangandaran memiliki berbagai macam keunikan baik dari jenis kegiatan usaha, produk, maupun hal lainnya yang memiliki potensi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, permasalahan yang umum dihadapi pelaku UMKM seperti keterbatasan permodalan, SDM yang kurang kompeten dibidangnya dan penggunaan teknologi perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk penguatan. Metodologi pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Selain itu, sumber data lainnya berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan sebagainya. Tujuan penelitian ini guna meningkatkan potensi UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kata kunci: UMKM, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kabupaten Pangandaran

1. Introduction

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) merupakan sebuah sistem yang menuju sebuah kesepakatan dalam mengintegrasikan ekonomi antar negara ASEAN. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-

negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Berkaitan dengan perluasan ekonomi, MEA telah merencanakan peta ekonomi baru yang menguntungkan untuk negara-negara ASEAN yaitu dengan dibukanya pasar perdagangan bebas.

Dengan dibukanya perdagangan bebas, maka hal ini akan meminimalkan kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi penghalang untuk kegiatan ekspor impor seperti peraturan bea cukai. Di Indonesia MEA telah diberlakukan mulai Desember 2015, meski diawal memunculkan banyak kekhawatiran bagi sebagian orang akan daya saing yang dimiliki oleh tenaga kerja dan masyarakat, namun hal tersebut tidak menjadi sebuah hambatan, karena pada dasarnya MEA adalah peluang bagi suatu negara untuk lebih produktif dalam kegiatan ekonomi dan bagi masyarakat atau pelaku usaha merupakan sebuah moment yang tepat untuk memperkenalkan brand dalam negeri ke dunia internasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UMKM Indonesia belum memenuhi standar. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA adalah menumbuhkan sektor-sektor UMKM, semenjak sebelum dan sesudah MEA diberlakukan. Dengan demikian, Pemerintah terus memberikan dorongan dalam meningkatkan peran dari UMKM dalam memperluas pasar domestik dan internasional. Selain hal itu pemerintah memberikan program-program edukasi baik dalam saran dan prasarana yang memudahkan UMKM untuk lebih meningkatkan pengetahuan, skill, dan modernisasi kegiatan usaha.

2. Literature or conceptual review

ASEAN *Free Trade Area* untuk selanjutnya disebut dengan AFTA merupakan salah satu wujud kesepakatan dari negara-negara di wilayah ASEAN dalam upaya untuk menciptakan atau membentuk wilayah ASEAN sebagai suatu kawasan perdagangan bebas (FTA) dalam rangka

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan perdagangan bebas di wilayah regional ASEAN yang dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-IV tahun 1992 yang juga merupakan realisasi dari pertemuan para pemimpin ASEAN pada tahun 1991 yang dilaksanakan dengan tujuan membentuk kawasan perdagangan bebas di wilayah regional ASEAN.

Pembentukan AFTA berawal dari adanya kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk *the ASEAN Preferential Trade Association* (PTA) pada tahun 1997. Dalam PTA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memberi keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN.¹ Sistem PTA tidak memberi manfaat banyak untuk mengembangkan perdagangan di antara negara anggota ASEAN. Terhambatnya ini diakibatkan oleh adanya penggunaan *positive list* untuk barang-barang yang tercantum ke dalam skema liberalisasi. Hal ini berbeda dengan *negative list* dimana dinyatakan barang-barang apa saja yang tidak termasuk. Akibatnya banyak produk yang tidak dimasukkan.²

Pada tahun 1992, ASEAN membentuk *Framework Agreement on Enhancing Economic Cooperation*, yang melalui perjanjian ini melahirkan *the ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tujuan Strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Untuk itu, penghapusan rintangan tarif dan non-tarif di antara negara-negara anggota diharapkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan daya saing negara-negara anggota ASEAN.³

Berdasarkan *the CEPTA-AFTA Scheme (Agreement on Effective Preferential Tariff Scheme)*, 1992, negara-negara anggota diberi waktu 5 hingga 8 tahun untuk mengurangi tarif terhadap produk-produk yang ditentukan hingga kurang dari 20%. Kemudian pada tahun 1997, para pemimpin ASEAN sepakat mengesahkan *the ASEAN Vision 2020* (Visi ASEAN 2020). Visi ini menyerukan negara-negara anggota untuk memperkuat kerjasama ASEAN di bidang pembangunan yang dinamis. Maksud kerjasama ini adalah untuk mempererat integrasi ekonomi yang lebih erat. Visi juga berupaya menciptakan suatu regional ekonomi ASEAN yang lebih stabil, makmur dan kompetitif, yang di dalamnya terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan pembangunan ekonomi yang adil serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.⁴

¹ Beverly M. Carl dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997., hlm.133

² Beverly M. Carl dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, *Ibid.*, hlm.134

³ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, *Ibid.*, hlm.135

⁴ *Ibid.*, hlm.136

Dalam rangka untuk memastikan implementasi perdagangan bebas dengan efektif, suatu perjanjian mengenai kepabeanan, *the ASEAN Customs Agreement*, ditandatangani. Penomeran tarif akan diseragamkan (harmonisasi). Begitu pula halnya dengan prosedur sistem penilaian dan kepabeanan. Suatu sistem baru ditetapkan, yaitu *the Green Lane System*, guna mempercepat pengurusan produk-produk yang berada di bawah CEPT.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan serta mengoptimalkan sektor perekonomian berupa UMKM, maka diperlukan dorongan dari pemerintah berupa ajakan pemerintah terhadap rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan UMKM di Indonesia. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaanpelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang. Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”.

⁵ Beverly M. Carl dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Ibid., hlm.137

Selain itu, bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka penguatan UMKM agar tetap bertahan serta dapat bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah dengan cara penguatan permodalan. Sejak tahun 2012, pemerintah mulai memperhatikan potensi UMKM dengan cara mempermudah pemberian kredit kepada pelaku UMKM dalam merintis usahanya. Dengan demikian, pemerintah terus menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai bank dalam mendukung program tersebut. Lebih lanjut, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5% dari semua sektor UMKM, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 juga sudah ditetapkan sebesar 20%. Ketentuan Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia sangat merespon perkembangan UMKM. Diharapkan dengan adanya penguatan permodalan tersebut pertumbuhan dan perkembangan UMKM benar-benar dapat mewujudkan harapan bahwa penguatan UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa.

Dalam jurnal ini, Penulis mengambil contoh komunitas UMKM Baraya di Kabupaten Pangandaran. Komunitas UMKM Baraya merupakan salah satu komunitas yang terdiri dari berbagai pelaku UMKM yang mempunyai produk yang beragam juga seperti makanan, minuman, makanan ringan, susu kambing, dan sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM di Komunitas UMKM Baraya, ditemukan fakta bahwa pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan serta mengikutsertakan komunitas UMKM Baraya dalam rangka meningkatkan kualitas dari pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas tersebut. Adapun bentuk dukungan yang diberikan seperti memberikan sosialisasi serta pelatihan dalam rangka meningkatkan produksi, pemasaran maupun hal lainnya yang memiliki relevansi dengan UMKM tersebut dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Bahwa atas bantuan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran terhadap Komunitas UMKM Baraya, banyak manfaat yang diperoleh oleh para pelaku UMKM tersebut sehingga meningkatkan hasil penjualan serta pemasaran yang lebih baik, bahkan ada pelaku UMKM di komunitas tersebut yang berhasil menjual produknya ke negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa peran pemerintah dalam

mengikutsertakan pelaku UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah baik.

Namun, pelaku UMKM yang tergabung di dalam Komunitas UMKM Baraya juga memiliki keresahan dalam hal bantuan pemerintah maupun perbankan dalam memberikan modal. Para pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal dikarenakan alasan-alasan yang dijadikan dasar pemikiran oleh perbankan dalam memberi pinjaman uang yaitu dengan memperhatikan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*).

Rencana Keberlanjutan Program

Penulis berpendapat bahwa dalam mengembangkan potensi UMKM di Kabupaten Pangandaran maka setidaknya terdapat beberapa aspek penting. Pertama, dengan cara memproduksi konten kreatif juga oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Membuat konten kreatif adalah salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan pemasaran digital. Konten kreatif itu sendiri ada banyak bentuknya, antara lain adalah blog, forum diskusi, *chatting, tweet, podcast, pin*, gambar *digital, video, file audio*, iklan, dan sebagainya. Oleh karena itu mengikuti pelatihan dalam membuat konten kreatif dan strategi pemasaran digital menjadi penting bagi para pelaku UMKM karena dapat mendongkrak merek dari para pelaku UMKM dengan biaya yang minim.

Kedua, dengan cara memperkenalkan serta meningkatkan penggunaan elektronik dan internet bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pangandaran untuk memperluas pangsa pasar penjualan sampai ke negara-negara yang berada di Asia Tenggara serta dapat meningkatkan pendapatan secara pasti.

Ketiga, dengan cara UMKM harus memiliki strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan antar UMKM. Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan cara membuat produk menjadi unik, *branding* dan *packaging* yang cukup bagus, menentukan STP (*segmenting, targeting, positioning*), memanfaatkan *e-commerce*, konsisten dalam menjalani strategi pemasaran.

Keempat, dengan cara mendaftarkan merek maupun bentuk kekayaan intelektual lainnya. Merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Pemalsuan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara nyata akan merugikan pelaku usaha yang memproduksi produk dengan merek yang asli. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas diperlukan suatu perlindungan merek barang-barang yang diproduksi UMKM.

4. Conclusions

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu sektor perekonomian yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi roda penggerak perekonomian nasional serta siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). UMKM di Indonesia, terutama di Kabupaten Pangandaran masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UMKM Indonesia belum memenuhi standar.

Guna menjawab permasalahan tersebut maka pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM diharapkan dapat memberi dukungan serta mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengembangkan UMKM di Indonesia. Selain itu, bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka penguatan UMKM agar tetap bertahan serta dapat bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah dengan cara penguatan permodalan.

References

- Handayani, Sauci. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo.
- Beverly M. Carl dalam Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997., hlm.133
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Surabaya.
- Yuwono, Teguh. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah